

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang tentunya masalah utama yang mendasar adalah pembangunan ekonomi untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat. Pembangunan ekonomi melalui usaha peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi menjadi prioritas utama yang harus di lakukan oleh negara berkembang untuk dapat meningkatkan perekonomiannya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Tujuan inti dari proses pembangunan adalah meningkatnya ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kehidupan pokok, meningkatnya standar hidup (pendapatan, penyediaan lapangan pekerjaan, dan perbaikan kualitas pendidikan) dan perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial (Arsyad, 2010:11).

Keberhasilan pembangunan ekonomi dapat di ukur dari peningkatan kesempatan kerja. Namun di suatu daerah tidak terlepas dari penanganan masalah ketenagakerjaan khususnya penyerapan tenaga kerja serta pengangguran. Perluasan penyerapan tenaga kerja diperlukan untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk usia muda yang masuk ke pasar tenaga kerja. Ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dan penciptaan lapangan kerja akan menyebabkan antara tingginya angka pengangguran. Kemudian, meningkatnya angka pengangguran akan mengakibatkan pemborosan sumber

daya dan potensi angkatan kerja yang ada, meningkatkan beban masyarakat, merupakan sumber utama kemiskinan dan mendorong terjadinya peningkatan keresahan sosial, serta menghambat pembangunan ekonomi dalam jangka panjang (Depnakertans,2020).

Di Indonesia adalah masalah upah yang rendah dan tingkat pengangguran yang tinggi serta penambahan penduduk yang terus meningkat. Pesatnya peningkatan jumlah angkatan kerja menunjukkan penawaran tenaga kerja di dalam pasar bertambah, meskipun penawaran tenaga kerja yang bertambah tidak selalu di iringi dengan permintaan tenaga kerja.

Gambaran masalah ketenagakerjaan di Indonesia semakin memburuk pada tahun 2020 ketika pandemi Covid-19 mulai mewabah di negara ini bahkan di seluruh dunia di mana kondisi ini bukan hanya menyebabkan krisis kesehatan tetapi juga menyentuh perekonomian. Dampak dari pandemi ini aktivitas perekonomian menjadi terhambat dan banyak perusahaan terpaksa membatasi jumlah tenaga kerja yang diserap dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para pekerja. Secara menyeluruh, hampir semua sektor kehidupan masyarakat merasakan dampak dari pandemi Covid-19 termasuk penyerapan tenaga kerja.

Secara makro, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di suatu perekonomian, antaranya adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mendorong kegiatan dalam perekonomian sehingga barang dan jasa yang akan dihasilkan bertambah. Semakin besar permintaan terhadap barang dan jasa maka semakin banyak barang dan jasa yang akan dihasilkan.

Peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa yang mampu dihasilkan oleh suatu negara menandakan adanya peningkatan faktor produksi yang digunakan dalam kegiatan produksi baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Hal ini berarti jika pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan diikuti oleh peningkatan jumlah penyerapan tenaga kerja. Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan indikator makro yang biasa digunakan untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara (Hasyim, 2016:232).

Faktor lain yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja adalah upah minimum. Dalam teori tenaga kerja, upah ditempatkan sebagai barang harga dari tenaga kerja yang ditentukan oleh antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Permintaan menetapkan upah minimum yang harus dibayarkan pengusaha kepada tenaga kerja dari mendapatkan upah yang terlalu rendah, sehingga upah yang diterima seimbang dengan kinerja yang mereka lakukan dan mencukupi standar kebutuhan hidup layak. Penerapan kebijakan upah minimum merupakan usaha dalam rangka meningkatkan upah perkapita pekerja sehingga tingkat upah rata-rata tenaga kerja dapat meningkat. Upah minimum dianggap sebagai kebijakan yang dapat memberikan kontribusi untuk keadilan sosial dengan meningkatkan upah minimum bagi buruh/pekerja

Sumatera Selatan sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang menjadi provinsi yang memberikan sumbangsih besar terhadap perekonomian di Indonesia dengan berbagai sector di Sumatera Selatan pertumbuhan infrastruktur, sarana prasarana kota yang terus menggeliat. Namun, di Provinsi Sumatera Selatan yang tak lepas dari masalah masalah ekonomi. Penyakit ekonomi yang terjadi di

Sumatera Selatan ialah jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, jumlah pengangguran di Sumatera Selatan juga dipengaruhi upah minimum. Upah ini adalah faktor kunci mengapa individu ingin bekerja. Berikut gambaran mengenai upah minimum, pertumbuhan ekonomi dan keadaan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 1.1
Perkembangan Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan
Tenaga Kerja
Di Provinsi Sumatera Selatan 2018 – 2022

Tahun	Upah Minimum (Rupiah)	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	Penyerapan Tenaga Kerja (Jiwa)
2018	2.595.995	6.01	3.963.870
2019	2.804.453	5.69	4.012.611
2020	3.043.111	-0.08	4.091.383
2021	3.144.466	3.58	4.179.708
2022	3.144.466	5.23	4.289.704

Sumber : bps.go.id

Berdasarkan pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa upah minimum di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2018 hingga tahun 2021 selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yakni sejak pada tahun 2018 hingga tahun 2021. Namun pada tahun 2022 upah minimum sama besarnya seperti tahun 2021 yaitu sebesar 3.144.466 rupiah. Menurut Kepala Disnakertrans Sumatera Selatan mengatakan, hal tersebut dikarenakan nilai UMP untuk tahun 2022 itu sudah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dan peraturan pemerintah Nomor 36 tahun 2021 sebagai turunannya.

Pada tabel pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2018 hingga 2022 berfluktuasi, yang selalu berubah-ubah setiap tahunnya.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah di tahun 2018 dan yang terendah pada tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi juga mengalami pada tahun 2019 hingga pada tahun 2020 mengalami penurunan. Hal ini pada kenyataan disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang membawa dampak negatif bagi seluruh perekonomian Indonesia bahkan dunia. Kemudian pertumbuhan ekonomi kembali meningkat pada tahun 2021 hingga 2022. Hal ini disebabkan perekonomian mulai stabil. Pada umumnya menurunnya pertumbuhan ekonomi salah satunya disebabkan oleh faktor pendapatan, sehingga jika hal ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan maka pertumbuhan ekonomi akan menurun. Apalagi selama pandemi Covid-19 terjadi, pandemi ini membawa perekonomian sangat buruk, lapangan pekerjaan berhenti beroperasi sehingga pendapatan menurun. Selanjutnya penyerapan tenaga kerja yang bekerja di Provinsi Sumatera Selatan untuk penduduk yang bekerja mengalami perkembangan yang cukup stabil dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 penduduk bekerja di Sumatera Selatan mencapai 4.289.704 jiwa.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tingkat upah memiliki pengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Teori yang dikemukakan oleh beberapa peneliti, Pratomo (2010), Pusposari (2010), Lindner and Zipperer (2019) mengemukakan bahwa setiap kenaikan upah minimum mengakibatkan pengurangan penyerapan tenaga kerja. Sedangkan pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja yang berarti bahwa jika pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan maka penyerapan tenaga kerja juga akan meningkat. Produk Domestik Bruto (PDB) memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja dengan jumlah tenaga kerja

dengan asumsi apabila pertumbuhan ekonomi meningkat, maka jumlah nilai tambah output dalam seluruh unit ekonomi suatu wilayah akan meningkat, output yang jumlahnya meningkat tersebut akan menyebabkan terjadinya peningkatan terhadap jumlah penyerapan tenaga kerja (Listyaningsih, 2017).

Tetapi jika dilihat lagi pada tabel 1.1 pada tahun 2018-2021 upah minimum selalu mengalami kenaikan tetapi penyerapan tenaga kerja ikut meningkat. Kemudian pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi menurun akan tetapi penyerapan tenaga kerja mengalami peningkatan.

Melihat fenomena yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan, hal ini jelas bertentangan dengan teori hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

“Analisis Pengaruh Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi, Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2003-2022”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dikemukakan, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini apakah ada pengaruh Upah Minimum dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Sumatera Selatan Tahun 2003-2022 secara parsial dan simultan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah ada pengaruh Upah

Minimum dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Sumatera Selatan Tahun 2003-2022 secara parsial dan simultan.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan judul tentang pengaruh upah minimum dan pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Selatan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak pemerintah dalam memutuskan suatu kebijakan terkait masalah penyerapan tenaga kerja. Dan bagi pihak lain penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan ketenagakerjaan.